

Pengelolaan Keuangan Daerah

2022

PERDA KAB. TABALONG NO. 10 LD 2022/No.10 TLD NO. 07, 112 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Abstrak : - Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten tabalong memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing Daerah memperhatikan prinsip demokrasi, pemertaan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tugas dan tanggungjawab yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong adalah pengelolaan keuangan Daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 01 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 06 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 01 Tahun 2022, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 02 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 45 Tahun 2017, PP No. 56 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PerPres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 61 Tahun 2007, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permendagri No. 77 Tahun 2020 Perda Kab. Tabalong No. 05 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Ruang Lingkup, Kewenangan Pengelola Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kekayaan Daerah dan Utang Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Informasi Keuangan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2022 dan ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2022.

- Penjelasan 30 hlm.